

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi yaitu sebuah proses yang menyertakan perbaikan sistem suatu kelembagaan dan mengarah pada eskalasi pendapatan riil perkapita dalam sebuah wilayah dengan jangka waktu relatif panjang (Lincoln Arsyat, 1997). Untuk dapat menganalisis serta mengamati pembangunan ekonomi dalam segi nasional maupun daerah maka diperlukannya pengamatan yang berhubungan dengan mekanisme yang saling terikat dan saling berdampak antar fakto-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Dengan demikian dimungkinkan untuk mengetahui urutan peristiwa yang terjadi dari langkah awal pembangunan ke langkah pembangunan selanjutnya yang diputuskan serta konsekuensinya terhadap pengembangan aktivitas perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengukur keefektifan sebuah pembangunan daerah maka diperlukannya menganalisis percepatan pertumbuhan yang berkembang dan tujuan pembangunan suatu wilayah. Perkembangan ekonomi yang meningkat secara signifikan menggambarkan kelangsungan ekonomi pada daerah tersebut. Hal ini dapat berhasil apabila produksi barang dan jasa atau produk domestik bruto (PDB) meningkat setiap tahunnya. Makadario itu, pertumbuhan ekonomi dalam makroekonomi diartikan sebagai PDB, yang dapat diartikan juga sebagai persilihan bangsa. (Tambunan, 2001).

Pusat dari pemerataan perolehan pendapatan menjadi perspektif yang paling penting untuk diamati dalam rancangan serta tujuan dari pembangunan nasional Indonesia dalam rencana memperoleh kesetaraan. Dalam mencapai kesetaraan maka diperlukannya penurunan kesenjangan dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan cara mengoptimalkan berbagai macam sektor ekonomi yang memiliki superioritas bersifat kompetitif di setiap daerah secara efektif. PDRB per kapita juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menggambarkan kesejahteraan penduduk suatu daerah. Hal ini dapat diartikan jika nilai PDRB perkapita pada sebuah daerah mengalami kenaikan sehingga diikuti peningkatan kemakmuran penduduknya semakin membaik.

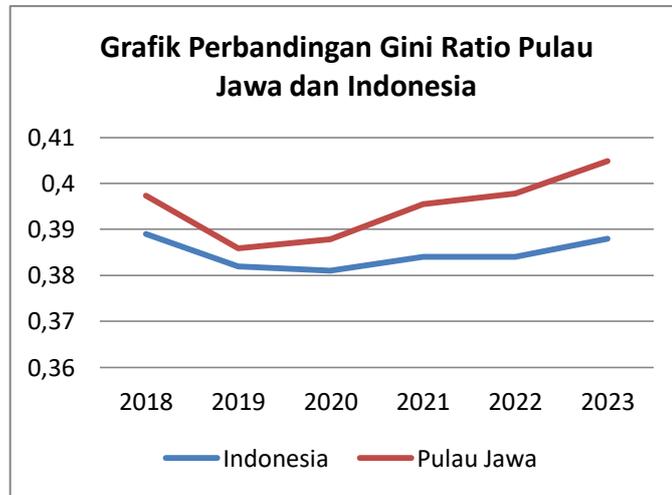
Berdasarkan data PDRB Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, yang di publish oleh BPS menggambarkan bahwa pendapatan dan kesejahteraan di Provinsi Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2022, pada tahun 2018 dengan nilai 1.563.441,82M Rupiah, pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan hingga mencapai 1.649.895,64M Rupiah, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga mencapai nominal sebesar 1.611.507,78M Rupiah yang diakibatkan dari adanya pandemic yang maharajalela dunia termasuk di Indonesia tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan nilai PDRB kembali dengan masing-masing nilai sebesar 1.668.749,44 Milyar rupiah pada tahun 2021 dan 1.757.821,43 Milyar Rupiah pada tahun 2022.

Ketidak merataan pendapatan antar daerah dapat diindikasikan melalui selisih tinggi rendahnya PDRB yang dimiliki tiap daerah. Tidak diragukan lagi, tujuan terakhir dari pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan kemakmuran penduduk secara utuh, yang dapat ditakar berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan peningkatan pengedaran pendapatan antar daerah. Jika pertumbuhan ekonomi tidak terdapat kesetimbangan dalam pemerataan pendapatan, itu akan memiliki konsekuensi yang signifikan salah satunya ketimpangan pembangunan. Menurut Nishiah (2017), konsekuensi dari proses serta perubahan pembangunan akan menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan pada suatu daerah.

Meskipun perekonomian daerah kuat tidak dapat dipastikan terdapat pemerataan pendapatan, salah satu rencana pembangunan ekonomi yang mumpuni yaitu dengan percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Tak terkecuali Indonesia juga mengalami ketimpangan pendapatan antar daerah dalam suatu wilayah yang sama dan cukup menonjol. Perbedaan pendapatan tersebut terlihat pada tidak meratanya indeks gini tiap provinsi di Indonesia sehingga berdampak pada manfaat public. Ketimpangan pendapatan tersebut dapat dilihat dari rilis data gini ratio, sebagai contohnya berikut grafik perbandingan gini ratio pulau Jawa dengan gini ratio Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS,2023)

**Grafik 1.1**

**Perbandingan Gini Ratio Pulau Jawa dan Indonesia**



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Menurut BPS, sepanjang 6 tahun nilai rasio gini Pulau Jawa lebih tinggi dari rasio gini Indonesia. Dapat dilihat dalam grafik diatas bahwa pada tahun 2018 hingga 2020 rasio gini Indonesia mengalami penurunan dari yang 2018 senilai 0,389 poin, menurun pada tahun 2019 menjadi 0,382 poin dan 2020 menurun menjadi 0,381 poin. Sedangkan rasio gini Pulau Jawa pada tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan yang awal 0,3973 poin lalu menurun mencapai 0,3858 poin. Pada tahun 2020 rasio gini Pulau Jawa mengalami kenaikan mencapai 0,3878 poin, dimana hal ini berbalikan dengan rasio gini Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2023 gap antara rasio gini Indonesia dan Pulau Jawa termasuk besar dengan total gap 0,0168 poin dengan masing poin Indonesia senilai 0,388 dan Pulau Jawa senilai 0,4048 Nilai rasio gini memiliki nilai 0 hingga 1, semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut.

Salah satu wilayah dari pulau Jawa dengan tingkat ketimpangan relative tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur.

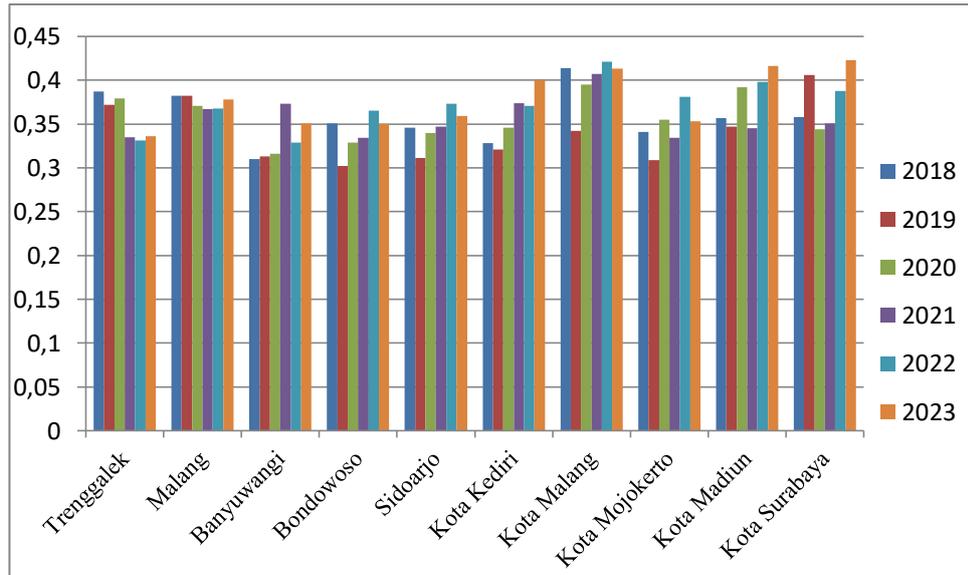
Pada dasarnya ketimpangan pendapatan terjadi dikarenakan adanya perbandingan antar kumpulan penduduk berpendapatan rendah dan kumpulan penduduk berpendapatan tinggi yang sangat signifikan dan tingkat kemiskinan atau total masyarakat yang terletak pada *under poverty line* sehingga yang kemudian akan menjadi persoalan dalam kasus di negara berkembang. Ketimpangan tidak akan berhasil dihilangkan, namun dapat diminimalisir hingga tingkat yang dapat ditoleransi oleh suatu sistem social sehingga seiring dengan pertumbuhan sistem, keharmonian dalam sistem tetap terjaga. Makadari itu, tidak mengherankan apabila ketimpangan itu terjadi, baik itu di negara maju, negara sedang berkembang, maupun negara tertinggal atau miskin. Akan tetapi hal yang dapat dijadikan pembeda yaitu besarnya tingkat ketimpangan yang terjadi pada tiap-tiap negara.

Provinsi Jawa Timur juga yaitu wilayah yang juga memiliki peringkat penetrasi yang relative tinggi, serta terdapat disparatif laju pembangunan antar wilayah. Jawa Timur merupakan sebuah provinsi di Indonesia dengan yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan berbagai macam karakteristik wilayah yang berbeda. Perbedaan karakteristik akibat perbedaan potensi sumberdaya yang dimiliki dan letak geografis masing-masing daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap munculnya pola pembangunan di Jawa Timur, yang kemudian mengakibatkan pola pembangunan ekonomi tidak merata dan menimbulkan kapasitas pertumbuhan yang berbeda-beda. Kapasitas pertumbuhan yang menjadi pembeda pada tiap wilayah ini yang

kemudian akan menimbulkan ketimpnagan pendapatan antar daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berikut grafik dari beberapa rasio gini Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

**Grafik 1.2**

**Gini Rasio Kota/Kabupaten Jawa Timur**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023

Bakorwil merupakan lembaga koordinasi di tingkat wilayah di Indonesia. Badan ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan antar-instansi pemerintah dalam suatu wilayah tertentu, seperti provinsi atau kabupaten (BPK Jatim). Menurut 5 pembagian Bakorwil(Badan Koordinasi Wilayah) Jawa Timur peneliti menggunakan 10 Kabupaten/Kota dalam penelitiannya. Sepuluh daerah tersebut dipilih berdasarkan rata-rata rasio gini tiap daerah dari tahun 2018 hingga 2020, dimana tiap Bakorwil dipilih dua Kabupaten/Kota. Dimana Bakorwil I terdapat Kabupaten Trenggalek dengan rasio gini tertinggi dari tahun 2018-2020 yaitu 0,38 dan Kota Madiun rasio gini tertinggi tahun 2023 mencapai 0,42 poin. Bakorwil II terdapat Kota

Kediri dimana pada tahun 2023 mencapai 0,4 poin dan Kota Mojokerto dengan rasio gini 2022 sebesar 0,38. Bakorwil III terdapat Kota Malang dimana pada tahun 2018, 2021 dan 2022 rasio gini mencapai 0,4 dan Kabupaten Malang mulai tahun 2020 hingga 2023 mencapai lebih dari 0,4. Bakorwil IV terdapat Kabupaten Sidoarjo rasio gini tahun 2022 mencapai 0,37 dan Kota Surabaya pada tahun 2022 senilai 0,38 akan tetapi pada tahun 2019 Kota Surabaya mencapai 0,4 dan pada tahun 2023 mencapai 0,42 poin. Terakhir, Bakorwil V terdapat Kabupaten Banyuwangi dimana rasio gini 2023 mencapai 0,35 dan Kabupaten Bondowoso dimana rasio gini 2023 mencapai 0,35(BPS, 2022). Besarnya rasio gini di Kota/Kabupaten di Jawa Timur menandakan kurangnya distribusi pendapatan yang merata. Makadari itu berikut faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpngan pendapatan yaitu, Indeks Pembangunan Manusia(IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) dan jumlah penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu suatu ukuran yang digunakan sebagai dampak kinerja pembangunan suatu daerah dan mempunyai perspektif yang sangat luas, karena menunjukkan kualitas penduduk suatu daerah ditinjau dari pendidikan yang diperoleh, taraf hidup yang mumpuni serta angka harapan hidup (Indira Auria, 2021). Ketidakmerataan IPM antar wilayah mengakibatkan wilayah yang memiliki nilai IPM relative tinggi akan mempunyai taraf manusia yang lebih tinggi yang dapat mendukung penunjang pembangunan dan sebaliknya. Berikut angaka IPM di Kota Malang pada tahun 2021 senilai 82,04, mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 82,71. Sedangkan IPM pada Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 mencapai

angka 67,04 kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 67,87(BPS, 2022).

Factor pengaruh lainnya yaitu pengangguran, agar mencapai tujuan dalam menekan angka ketimpangan pendapatan maka dengan mengecilkan angka pengangguran akan berdampak. Hampir semua daerah, tingkat pengangguran terbuka setengah lebih kecil daripada tingkat pengangguran (Hindun, dkk. 2019). Hal tersebut dapat dikatakan cukup baik. dikarenakan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja namun mempunyai penghasilan kurang dari tingkat optimalnya, sehingga ketimpangan pendapatan yang timbul dapat dikurangi. Berbeda dengan tingkat pengangguran terbuka akan memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin dan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Menurut Farhan dan Sugianto (2022), ketimpangan pendapatan dipengaruhi signifikan oleh kemiskinan, akan tetapi indeks pembangunan manusia serta pengangguran tidak berpengaruh signifikan dengan kenaikan atau penurunan kesenjangan pendapatan di Pulau Jawa. Pengangguran tidak berpengaruh signifikan dikarenakan terdapat beberapa program dari pemerintah yang mendorong masyarakat dalam memperoleh penghasilan. Salah satu program yang diberikan yaitu dengan memberikan pelatihan kerja serta berwirausaha. Dari program tersebut masyarakat pulau Jawa dapat memperoleh pekerjaan dan masyarakat yang berwirausahah mampu membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Sedangkan menurut Arkum dan Amar(2022) dari hasil penelitian data 15 tahun bahwa kemiskinan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran

memiliki pengaruh yang signifikan atas kenaikan maupun penurunan disparatif distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaruh keempat variabel tersebut mencapai 60,9 persen, sehingga variabel lain masih mempengaruhi 39,1 persen.

Selain IPM dan TPT, ketimpangan pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Pertambahan populasi dari waktu ke waktu dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Bersama bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan jumlah tenaga kerja pun bertambah, serta peningkatan ini berdampak pada meningkatnya output suatu daerah. Akibat buruk dari pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peluang kerja pada tiap wilayah akan mengakibatkan pelambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan melambatnya pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan penurunan pendapatan perkapita suatu daerah.

Sedangkan berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Dea Fajar Ayu, dkk(2019), diperoleh hasil dari pengolahan data bahwa peningkatan atau penurunan disparatif pendapatan dipengaruhi oleh TPT dengan koefisien variabel senilai 0,0019 dimana jika setiap kenaikan TPT 1% diikuti dengan kenaikan disparatif pendapatan juga senilai 0,0019%. Studi ini juga memperoleh hasil bahwa disparatif pendapatan juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada studi kasus Provinsi Jawa Barat. Hal ini disertai bukti nilai koefisien senilai 0.0137 dengan angka signifikan 5%. Dimana jika jumlah penduduk mengalami kenaikan sejauh 1%, diikuti dengan kenaikan disparatif pendapatan juga sejauh 0,0137%.

Berdasarkan studi yang telah dijalankan oleh Susi Lestari(2015), memaparkan hasil bahwa variable pertumbuhan ekonomi dan population memiliki pengaruh yang signifikan dan positive terhadap perubahan kesenjangan pendapatan di kota atau kabupaten Jawa. Dalam penelitian ini dibuktikan dengan diterimanya  $H_0$ . Akan tetapi kesenjangan pendapatan di kota atau kabupaten Jawa Timur dipengaruhi signifikan dan negative oleh inflasi.

Oleh karena itu, agar pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilaksanakan maksimal maka perlunya penekanan angka kesenjangan pendapatan. Dimana kesenjangan pendapatan antar daerah sendiri termasuk dalam persoalan yang perlu diselesaikan dengan meninjau ditinjau terus-menerus. Terdapat wilayah yang tingkat pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi, akan tetapi tidak menampik juga terdapat daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang relative rendah. Perbedaan tersebut biasanya timbul dari ketidak samaan kelanjutan dan kemajuan yang terjadi yang diakibatkan dari minimnya sumberdaya yang diperoleh beberapa daerah. Meskipun Jawa Timur termasuk pusat aktivitas perekonomian di pulau Jawa maupun nasional akan tetapi hal ini tidak menjamin pemerataan pembangunan ekonominya. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah termasuk daerah relative tertinggal yang kemudian menyebabkan semakin luasnya ketimpangan antar daerahnya. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini tidak terlepas dari factor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia. Makadari itu dilakukannya penelitian ini yang memiliki tujuan guna memperoleh hasil faktor apa saja

yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan sehingga dari penelitian tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kota/Kabupaten di Jawa Timur.**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Setelah menyusun latar belakang yang telah dipaparkan pada halaman sebelumnya, maka diperoleh persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang hendak membahas pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan yang dijelaskan dengan presentase Gini Ratio di Kota/Kabupaten di Jawa Timur 2018-2023. Sehingga dapat diuraikan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota/Kabupaten Jawa Timur?
- 2) Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota/Kabupaten Jawa Timur?
- 3) Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota/Kabupaten Jawa Timur.

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang telah dijabarkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Kota/Kabupaten Jawa Timur
2. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Kota/Kabupaten Jawa Timur.
3. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Kota/Kabupaten Jawa Timur

### **1.4.Ruang Lingkup**

Sebagai salah satu antisipasi agar penelitian ini kian terpusat, terarah, dan konsisten terhadap topik yang telah dipilih dan tidak melebar sehingga dalam penelitian ini perlunya ditetapkan variabel-variabel independen yang dikaji yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) terhadap ketimpangan pendapatan.

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) pada penelitian ini menggunakan data persentase TPT menurut Kota/Kabupaten Jawa Timur. Variabel jumlah penduduk di dalam penelitian ini memakai data jumlah penduduk Kota/Kabupaten Jawa Timur. Variabel IPM dalam penelitian ini menggunakan rasio Indeks Pembangunan Manusia menurut Kota/Kabupaten Jawa Timur. Serta variable ketimpangan pendapatan menggunakan gini rasio menurut Kota/Kabupaten Jawa Timur. Penelitian ini digarap dengan berfokus

pada Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur dari tahun 2018 sampai dengan 2023.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Setelah mengetahui tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka dapat menggambarkan beberapa manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diinginkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan berbarengan dengan menjadi penerangan yang dapat dimanfaatkan sebagai kepustakaan untuk para pembaca yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan yang diilustrasikan dengan persentase *gini ratio* dengan mengamati preferensi variabel-variabel independen yaitu tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia di Kota/Kabupaten Jawa Timur periode tahun 2018-2023.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan sebagai masukan bagi peneliti lain mengenai tema ketimpangan pendapatan.